

## ABSTRAK

Fajrin Nugraha : *Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan Partai politik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Dpc PKB Karawang)*

Latar Belakang dalam penelitian ini tentang keterwakilan perempuan di dalam pengurus partai PKB Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/Kota hanya bersifat himbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan tersebut. Padahal perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah kepengurusan sebuah parpol. Laporan Penelitian Woman Research Institute menyatakan bahwa partai-partai besar termasuk PPP, Partai Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDIP di tingkat daerah memiliki rata-rata representasi pengurus perempuan di bawah 30% rendahnya kepengurusan di daerah (Kab / Kota) berdampak pada rendahnya angka caleg perempuan di daerah.

Tujuan Penelitian untuk menganalisis 1) Sistem Rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang, 2) Implementasi keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang 3) Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Karawang terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang. Teori yang digunakan ialah teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*, kemudian teori Demokrasi sebagai *Middle Range Theory* dan teori hak politik perempuan sebagai *Applied Theory*.

Metode yang dipergunakan sifatnya Penelitian Lapangan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Tehnik dalam pemilihan datanya mempergunakan studi kepustakaan dan wawancara, jenis datanya menggunakan data sekunder yang meliputi beragam bacaan terkait judul penelitian misalnya literature, jurnal, artikel, dan buku terkait keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik, serta data primer meliputi undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem perekrutan pengurus dan kader dilakukan dengan cara sistem tertutup dimana, perekrutan berdasarkan penunjukan secara langsung karena ada hubungan keluarga, teman, dan pendukung yang loyal berpotensi membawa masa yang besar. 2) Implementasi keterwakilan perempuan sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang kurang dari 30%. 3) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PKB berdampak kepada perolehan suara caleg perempuan DPRD karawang menjadi anggota DPRD, pada pemilu 2014-2019 hanya 2 orang anggota DPRD, di pemilu 2019-2024 memperoleh 3 anggota DPRD Karawang.

Kata Kunci: Keterwakilan perempuan dalam pengurus partai PKB Karawang, Implementasi keterwakilan perempuan pengurus partai.